

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN
ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SIAK
(Studi Kasus Di Kecamatan Sei Mandau)**

Oleh:

DASRIL ARIFIN
NIM. 10675005063



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2013

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SIAK (Studi Kasus di Kecamatan Sei. Mandau)

Oleh

DASRIL ARIFIN
NIM. 10675005063

Peran Dinas Sosial sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan, melalui program-program yang telah di buat oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada, dan memberikan pelayanan yang optimal adalah kewajiban pemerintah agar permasalahan kemiskinan tersebut dapat berkurang.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak, penelitian ini khususnya pada peran dinas sosial dengan tujuan adalah untuk menganalisa peran dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling karena responden yang dijadikan sampel besar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 49 orang yang merupakan masyarakat atau keluarga miskin di kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah Obsevasi, Interview (wawancara) dan angket (kuesioner). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif, yaitu memberikan prediket pada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di kecamatan sei.mandau kabupaten siak ternyata belum efektif (belum baik) yang diukur dari tujuan indikator peran dinas sosial.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..	
PENGESAHAN ..	
PENGHARGAAN ..	
ABSTRAK ..	
DAFTAR ISI ..	
DAFTAR TABEL ..	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Sistematika Penulisan	17
 BAB II KERANGKA TEORI	
2.1 Pengertian Peranan	19
2.2 Peranan Dinas Sosial	21
2.3 Teori Kemiskinan	22
2.4 Perda Kabupaten Siak Tentang Penanggulangan Angka Kemiskinan ..	30
2.5 Konsep Operasional	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.2 Data yang diperlukan	34
3.3 Populasi dan Sampel	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Analisis Data	36
 BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Profil Kabupaten Siak	38
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Siak	39
4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	42
4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak	43
4.5 Profil Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	44
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1	P
embahasan 48	
5.1.1 Peran Atau Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial dalam Menaggulangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak	49

5.1.2 Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak	50
5.1.3 Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Hasil Wawancara	52

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	68
6.2 Saran	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Siak Tahun 2005-2012	8
Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2012	9
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	52
Tabel 5.2 Distribusi Jawaban Responden terhadap pemberian bantuan berdasarkan tingkat pendidikan yang di lakukan Dinas Sosial Kab. Siak untuk masyarakat Kec. Sei mandau	53
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga	55
Tabel 5.5 Distribusi jawaban responden berdasarkan pelayanan sosial yang diberikan oleh dinas sosial Kab. Siak terhadap keluarga miskin di Kecamatan Sei mandau	56
Tabel 5.6 Distribusi jawaban responden berdasarkan bantuan perbaikan perumahan keluarga miskin yang dilakukan oleh dinas sosial Kab. Siak Kec. Sei Mandau	57
Tabel 5.7 Distribusi responden berdasarkan pembinaan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kab. Siak terhadap anak-anak terlantar di Kec. Sei Mandau	58
Tabel 5.8 Distribusi responden terhadap bantuan pelatihan-pelatihan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kab. Siak terhadap kelompok usaha bersama di kecamatan Sei.Mandau	60
Tabel 5.9 Distribusi jawaban responden berdasarkan pembentukan kelompok usaha yang di berikan oleh dinas sosial kab.siak untuk masyarakat kecamatan sei.mandau	61
Tabel 5.10 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Bantuan Perumahan Kepada Masyarakat Miskin yang di berikan oleh Dinas sosial Kab. Siak untuk masyarakat di Kecamatan Sei. Mandau	62
Tabel 5.11 Distribusi jawaban responden berdasarkan pemberian keterampilan dalam usaha ekonomi produktif oleh dinas sosial kab.siak terhadap masyarakat di kecamatan sei.mandau	63
Tabel 5.12 Distribusi jawaban responden berdasarkan pembinaan dan pembimbingan terhadap gelandangan yang diberikan oleh	

Dinas Sosial Kab. Siak terhadap masyarakat di Kec. Sei Mandau	64
Tabel 5.13 Distribusi jawaban responden berdasarkan pembinaan dan keterampilan terhadap kesejahteraan keluarga yang di berikan oleh dinas sosial kab.siak terhadap masyarakat kecamatan sei.mandau	65
Tabel 5.14 Distribusi jawaban responden yang di berikan dinas sosial kabupaten siak berdasarkan penyuluhan dalam mengantisipasi bencana alam di kecamatan sei.mandau	66
Tabel 5.15 Distribusi jawaban responden berdasarkan pembinaan terhadap karang taruna yang di berikan oleh dinas sosial kabupaten siak kepada karang taruna yang ada di kecamatan sei.mandau	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu persoalan masyarakat yang sangat mendasar. Karena di satu sisi menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. Kemiskinan juga menjadi tanda dari perkembangan ekonomi pasar yang timpang dan kemunduran berbagai institusi sosial di dalam memecahkan persoalan penduduk. Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di dunia ini dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan, bahkan di Tingkat International telah dideklarasikan dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di ikuti oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia untuk menyepakati dokumen yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Millinium atau Millenium Development Goals (MDG's). Delapan agenda yang ingin dicapai dalam MDGs antara lain : (1) penanggulangan kemiskinan absolut dan kelaparan yang ingin dicapai pada 2015; (2) pencapaian pendidikan dasar bagi semua anak laki-laki dan perempuan yang ingin dicapai pada tahun 2015; (3) pemberdayaan kesederajatanan gender dan perempuan; (4) pengurangan tingkat kematian anak; (5) peningkatan kesehatan ibu; (6) pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; (7) menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menghentikan

perusakan lingkungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan; (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (**Nurhadi, 2007:72**).

Sementara bagi Indonesia persoalan kemiskinan menjadi satu persoalan tersendiri yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, dan diperlukan suatu strategi yang terpadu. Hal ini karena persoalan kemiskinan lebih bersifat multi dimensi dari pada persoalan lainnya yang dihadapi oleh bangsa ini. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat

kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (**Suryahadi dan Sumarto, 2001**).

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (**Soegijoko, 1997:137**).

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukkan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas).

Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Menurut **Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1)** upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.

Pada dekade 1990-an pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra). Adanya program-program tersebut dan program pembangunan lainnya secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi dengan timbulnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, telah menyebabkan bertambahnya penduduk miskin.

Akibat krisis ekonomi yang terus berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah penduduk Indonesia. Perlu dicatat bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat krisis ekonomi, tetapi juga dikarenakan perubahan standar yang digunakan (BPS, 2003:575). Jumlah penduduk yang meningkat tersebut terutama disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Dalam kondisi krisis, kenaikan harga-harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan nominal menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi miskin (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas).

Timbulnya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini: 1) Program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin; 2) Program pendidikan

dan perlindungan sosial; 3) Program kesehatan melalui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin; 4) Program padat karya untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002:29-30) Upaya tersebut dilanjutkan dengan meluncurkan program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM/DKE) pada akhir tahun 1998 berupa pemberian dana langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Berikutnya pemerintah juga melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan sasaran perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan sasaran perkotaan. Sebagai kelanjutan Program JPS, pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) yang dilaksanakan diantaranya pada bidang pangan, kesehatan, pendidikan, prasarana dan sebagainya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang semakin baik telah menjadikan Kabupaten Siak sebagai daerah yang berpotensi bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini merupakan daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk datang ke Kabupaten Siak, baik dengan tujuan bisnis, wisata, maupun untuk mencari pekerjaan, tentunya hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi dinamika kehidupan sosial masyarakat, karena dengan perkembangan sektor tersebut di atas dapat mendorong berkembangnya permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti gelandangan, pengemis, pengangguran, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, kriminalitas, dan narkoba. Dan pokok permasalahan yang

paling utama adalah pengaruhnya terhadap angka kemiskinan yang timbul di Kabupaten Siak itu sendiri.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian didasarkan pada Peraturan Presiden RI No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Siak membuat Perda No. 05 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2006, dalam rangka membentuk Dinas Sosial (DINSOS) yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.

b. Fungsi

Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas sosial; melakukan pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di pahami bahwa Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Siak dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kabupaten Siak.

Peranan Dinas Sosial (DINSOS) dalam menjalankan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di tingkat Kabupaten Saja akan tetapi pada tingkat Kecamatan juga di perhatikan oleh pemerintah.

Selain dari itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Siak juga melaksanakan peran sebagai pelaksana daerah dibidang Sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.

Tugas atau Peran Dinas Sosial kabupaten Siak dalam menanggulangi angka kemiskinan, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
3. Memperluas Ketahanan Sosial Masyarakat.
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang berbasis Kesejahteraan Sosial.

Sehubungan dengan penugasan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Siak telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di daerah Kabupaten Siak itu sendiri antara lain melalui serangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, meningkatkan peran dan kinerja Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan Organisasi Profesi, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pendayagunaan sumber dana sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan untuk meningkatkan peran Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial, pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga memiliki wawasan dan penunjang dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari jumlah data kemiskinan di Kabupaten Siak sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Siak Tahun 2005-2012

No	Tahun	Jumlah Keluarga Miskin
1.	2007	31. 721 KK
2.	2008	30.892 KK
3.	2009	31.887 KK
4.	2010	32.052 KK
5.	2011	32.660 KK
6.	2012	34.011 KK

Sumber Data: BPS Kabupaten Siak 2012

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Siak semakin meningkat sampai dengan tahun 2012. Hal ini berarti Pemerintah melalui Dinas atau Departemen yang menangani masalah kemiskinan belum berperan secara baik. Angka kemiskinan pada tingkat kecamatan yang ada di kabupaten siak yang ternyata masih belum merata dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Siak secara merata sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2: Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Siak Tahun 2012.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Keluarga Miskin
1.	Minas	15.900	2.774
2.	Siak	18.677	1.756
3.	Sei Apit	12.861	2.197
4.	Sei Mandau	10.660	5.728
5.	Kerinci Kanan	16.043	2.173
6.	Tualang	25.300	3.077
7.	Dayun	8.440	1.256
8.	Bungaraya	19.741	3.301
9.	Koto Gasib	10.704	2.043
10.	Kandis	5.790	2.201
11.	Lubuk Dalam	11.551	3.995
12.	Pusako	9.325	2.209
13.	Sabah Auh	7.890	1.301
Jumlah		172.882	34.011

Sumber Data: BPS Kabupaten Siak 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan perkecamatan yang paling tinggi angka kemiskinannya yaitu Kecamatan Sei Mandau 5.728 KK. Berdasarkan data di atas bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Siak dilihat dari perkecamatannya masih cukup tinggi hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti mata pencaharian masyarakatnya yaitu bertani, dan nelayan tradisional, kemudian faktor lain yaitu Komunitas Adat terpencil (KAT) yang lebih banyak bertempat tinggal di sekitar pinggiran.

Kasus kemiskinan pada Kabupaten Siak bukan merupakan kasus yang baru lagi, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang mendasar di bahas oleh negara begitu juga pemerintah daerah. Angka kemiskinan di Kabupaten siak memang tidak begitu berbeda jumlahnya tiap tahun karena hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor, disinilah peran Dinas Sosial untuk membahas persoalan kemiskinan tersebut.

Kegiatan KUBE ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang mana di dalam undang-undang ini mengatur semua program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang ada, jadi sekarang ini kegiatan program KUBE ini bukanlah program baru yang di buat oleh pemerintah namun kegiatan ini sudah ada sejak lama akan tetapi dahulunya program ini tidaklah berjalan dengan baik nya sebagai mana semestinya.

Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan KUBE yang di lakukan dinas sosial di kecamatan Sei. Mandau yang mana bisa kita lihat pada penjelasan di bawah ini;

Yang pertama kita harus mengatuhui apa pengertian dari KUBE itu sendiri:

KUBE adalah suatu kelompok yang di bentuk warga atau keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang atau keluarga-keluarga yang kurang mampu atau (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan program pemberdayaan fakir miskin.

Program KUBE ini mempunyai sasaran yaitu pada masyarakat miskin atau pada desa tertinggal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin di desa, melalui usaha-usaha penciptaan lapangan kerja produktif.

2. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat bersekala kecil dan menengah.
3. Meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan.

Penerimaan Bantuan stimulan pemberdayaan nya adalah para keluarga binaan sosial yang tergabung dalam KUBE, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan atau kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha.

Adapun kelompok yang di prioritaskan mendapatkan bantuan program stimulan adalah.

1. Kelompok penduduk atau petani miskin dan tidak cukup memiliki sumber penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya.
2. Kelompok wanita dan pemuda yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Tidak sedang menjadi peserta atau penerima bantuan dari peroyek lain yang sedang berjalan.
4. Satu kepala keluarga (KK) hanya di benarkan ikut serta dalam satu paket kegiatan pada satu tahun anggaran.

Adapun Mekanisme pengembangan bantuan stimulan yang benar dalam penerapan dan pengelolaan nya harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

TAHAP I: Pengelolaan Usaha dan jenis usaha yang akan di buat atau yang di rencanakan (Contoh : Ternak Kambing).

Bantuan stimulan berupa ternak yang diserahkan kepada masing-masing kelompok, merupakan milik kelompok, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan nya menjadi tanggung jawab bersama. beberapa pilihan cara pengelolaan bantuan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelompok antara lain:

Pengelolaan Bantuan Secara **Kolektif**, yaitu: bantuan ternak kambing yang diterima dikelola secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok dalam satu kandang dengan mengutamakan azas kebersamaan dengan cara mengadakan pembagian kerja secara adil dan merata. Di dalam kegiatan ini, tidak dibenarkan anggota Keluarga Binaan Sosial (KBS) diperlakukan sebagai buruh.

Pengelolaan bantuan Secara **Perorangan**, yaitu: karena pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bantuan stimulan tidak dapat dikelola secara kolektif (misalnya tempat tinggal saling berjauhan, lahan kosong yang terbatas untuk membuat kandang yang besar, dan lain-lain). maka bantuan stimulan dapat dikelola secara perorangan dengan catatan bahwa kegiatan tersebut masih terkait dengan kepemilikan kelompok, sehingga kepada yang bersangkutan (pengelola) tetap dikenakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kelompok.

TAHAP II: Pengguliran

Setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan bantuan diwajibkan melaksanakan pengguliran kepada warga lain yang membutuhkan disekitarnya baik secara perorangan maupun secara kelompok (KUBE) yang lain akan di bentuk sesuai dengan jumlah dan besarnya ternak yang digulirkan sesuai dengan bantuan stimulan yang diterima adapun waktu pelaksanaan pengguliran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota kelompok dengan persatuan Pembinaan KUBE.

TAHAP III: Pembagian Hasil/Keuntungan

Pengelolaan bersama kelompok bertanggung jawab terhadap pembagian keuntungan atau kerugian yang diderita kelompok. Setiap keuntungan/kerugian wajib dilaporkan kepada seluruh anggota. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan kelompok atau didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab anggota. Sebaiknya pembagian keuntungan diatur sebagai berikut : Insentif bagi pengelola : 25 %, Dibagikan kepada anggota: 20 %, Pengguliran: 50 %, Untuk usaha kesejahteraan sosial (UKS): 5 %.

TAHAP IV: Pengumpulan dana IKS (Iuran Kesetiakawanan Sosial)

Setelah melaksanakan kewajiban menggulirkan, dari ternak yang dipelihara oleh KUBE maka anggota KUBE wajib menyisihkan sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk tabungan kelompok atau Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS). Besarnya nilai IKS dan kapan mulai mengumpulkannya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok dengan

mempertimbangkan kondisi dan hasil usaha serta rasa kesetiakawanan sosial seluruh anggota kelompok. Dana IKS yang terkumpul dapat dipergunakan untuk : (Apabila sangat diperlukan sebagai penambahan modal usaha ekonomi produktif atau untuk penganekaragaman usaha, sebagai modal kegiatan Jaminan Kesetiakawanan Sosial (Jamkesos).

Dari tahapan-tahapan pengembangan bantuan stimulan di atas yang di berikan langsung oleh Dinas Sosial kepada masyarakat di kecamatan sei.mandau, namun program yang dibuat oleh Dinas Sosial tersebut tidaklah berjalan dengan mulusnya karena masih banyak masalah-masalah di temukan di dalam pengelolaan dan penerapan bantuan stimulan tersebut.

Kita bisa lihat masalah-masalah apa saja yang menghambat dari keberhasilan program stimulan tersebut yang sudah pernah di terapkan antara lain sebagai berikut;

1. Didalam pembagian kerja para anggota kelompok kadang-kadang tidak adil dan merata, misalnya tempat tinggal saling berjauhan, lahan kosong yang terbatas untuk membuat kandang yang besar, dan lain-lain.
2. Kurang berpengalaman nya warga di dalam pengurusan hewan ternaknya maka jumlah kambing akan berkurang dikarenakan ada yang mati.
3. Terjadinya penjualan kambing yang di lakukan oleh kelompok sehingga tahapan pengguliran kepada kelompok lain tidak dapat di lakukan lagi.
4. Ketidak adilan atau ketidak merataan di dalam pembagian hasil yang di peroleh antar sesama anggota di dalam kelompok tersebut.

5. Tidak adanya pengumpulan dana IKS (iuran kesetiakawanan sosial) di karenakan tidak memperoleh keuntungan dari hasil usaha tersebut.
6. Beberapa orang dari masyarakat ada juga yang tidak mau mengambil bantuan tersebut dengan alasan mereka akan merasa di bebani nantinya sehingga bisa menghambat aktivitas sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari permasalahan di atas program KUBE sudah pernah di terapkan di kecamatan sei.mandau namun penerapan nya belum lah berjalan dengan baik nya sesuai dengan harapan khusus nya bagi Dinas Sosial dan pada umum nya masyarakat di kecamatan sei.mandau itu sendiri, target yang di buat oleh Dinas Sosial belum lah tercapai dengan baik karena di dalam pengelolaan program KUBE tersebut banyak sekali di temukan faktor-faktor penghambat keberhasilan program itu sendiri sehingga hasil yang di peroleh belum lah maksimal dan masih jauh dari harapan sehingga perekonomian masyarakat belum terbantu dengan baik nya dan tingkat kemiskinan pun di kecamatan tersebut belum lah berkurang ,adapun faktor-faktor penghambat keberhasilan dari program KUBE tersebut bisa kita lihat pada permasalahan di atas,Ada juga faktor lainnya yang menghambat keberhasilan program di atas tersebut adalah proses pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur nya belum berjalan dengan baik ini sangat berpengaruh pada program yang di buat oleh Dinas sosial tersebut, Dinas Sosial tidak berhenti disitu saja dalam mengatasi kemiskinan yang ada akan tetapi Dinas Sosial selalu berupaya memantapkan program nya dan membuat program-program baru untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kecamatan sei.mandau

tersebut, salah satu peran Dinas Sosial adalah sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat miskin agar bantuan untuk masyarakat miskin tersebut tepat pada sasaran nya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Kecamatan Sei Mandau)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil diwujudkan secara nyata telah menyebabkan turunnya jumlah kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru (**UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas**).

Dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak yang telah diungkapkan di atas, penulis merumuskan pokok masalah yang paling disoroti penulis pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Peran Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak Kecamatan Sei Mandau?

2. kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak Kecamatan Sei. Mandau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kecamatan Sei.Mandau Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kecamatan sei.Mandau Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang di miliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa peran Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dalam usaha-usahnya menanggulangi angka kemiskinan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti persoalan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam Bab ini menguraikan tentang-tentang Deskripsi Teori, Kerangka Berpikir, serta Konsep Operasional.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini meliputi Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini menguraikan Deskripsi Lokasi Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Pembahasan dan Pengujian Hipotesis.

BAB VI : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Peranan

Menurut **Soerjono S.** (1990 : 26), bahwa "Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial".

Salbin T.R dan **Allen V.E** (dalam Miftah Thoha, 2005 : 263) menyatakan bahwa "Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal".

Selain daripada itu, **Soerjono Soekanto** (2000 : 122) juga menyatakan bahwa "Peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan prikelakuan". Patokan-patokan perilaku ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat setempat dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Peranan pemimpin juga didefinisikan oleh **E. Winardi** (2003 : 63) sebagai sesuatu yang mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan koordinasi aktivitas-aktivitas pihak bawahannya. Hal tersebut mencakup kegiatan penempatan pegawai/karyawan (Staffing) hingga pemberian tugas-tugas.

Hasymi Ali (2002 : 431-432) mendefinisikan "Konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan (Position) tertentu". Ia menggambarkan perilaku yang diharapkan daripadanya jika ia menduduki suatu jabatan, baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi. Sesuai

dengan pendapat tersebut **Freemont E. Kast** dan **James E. Rosenzweig** (Terjemahan Hasymi Ali, 2002 : 432), menegaskan bahwa "Peranan biasanya didefenisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari setiap orang dalam kedudukan tertentu, siapapun dia. Perilaku ini tentu saja ditentukan (Ordined) oleh masyarakat. Jadi, peranan itu menentukan semacam limit atas tipe ekspresi kepribadian yang mungkin dalam situasi tertentu".

Pendapat lain yang dikemukakan oleh **Rivai Z.** (2004 : 148) yang menerangkan bahwa "Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu". Artinya, tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadisos) sebagai aparatur pelaksana penegak peraturan-peraturan dalam bidang sosial di daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa Kepala Dinas Sosial (Kadisos) memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, maka Dinas Sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.2 Peranan Dinas Sosial

Sebagai satuan kerja perangkat 'daerah, Dinas Sosial Kabupaten Siak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Peran atau upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Siak antara lain:

1. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peran atau upaya-upaya tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan:
 - a. Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 - b. Pelatihan Keterampilan, Pembentukan dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - c. Bantuan Perbaikan Perumahan Fakir Miskin / Tidak Layak Huni.
2. Program Pembinaan Anak Terlantar melalui Kegiatan Pendataan Anak Terlantar.
3. Program Pembinaan Panti Asuhan melalui Kegiatan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penertiban, Pembinaan dan Bimbingan Gelandangan dan Pengemis.
 - b. Bantuan Pengadaan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Sekolah Luar Biasa (SLB)
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo melalui kegiatan Pengadaan Prasarana Panti Asuhan.

2.3 Teori Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*).

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan

membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah (Supriatna, 2000:196).

Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997:137).

Menurut **Sar A. Levitan** dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin (John Friedman (1979) dalam Ridlo (2001:8).

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan (Effendi, 1993:201-204).

Tinjauan yang sama dengan penjelasan yang berbeda dikemukakan Nugroho dan Dahuri (2004:165-166). Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2003:25) memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi.

Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

b. Penyebab Kemiskinan

Pada umumnya indikator kemiskinan (Mudrajad Kuncoro: 142) menggunakan kriteria garis kemiskinan (Poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Salah satu kriteria Garis Kemiskinan yang digunakan adalah versi BPS (Badan Pusat Statistik).

Batas Kemiskinan pada masing-masing daerah berbeda-beda karena didasarkan pada lokasi yang berbeda dan standar kebutuhan hidup masing-masing daerah. BPS (Badan Pusat Statistik) membatasi yang dikatakan miskin dari segi besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.

BPS menggunakan dua pendekatan dalam menentukan garis kemiskinan tersebut, yaitu Pendekatan Kebutuhan Dasar (Basic Needs Approach) dan Pendekatan Head Count Index. Pendekatan Pertama, merupakan pendekatan yang melandaskan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan ukuran kemiskinan absolut, dimana Jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Artinya, komponen garis kemiskinan terdiri dari 2 (dua) Komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (Food Line) dan garis kemiskinan non makanan (Nonfood Line).

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan

yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004:167-168; Soegijoko, 1997:137; dan Nasution, 1996: 48-50).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Sedangkan Sharp et. al. dalam Kuncoro (2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah.

Batas Kemiskinan juga dijabarkan oleh pakar lainnya bahwa:

"Dalam konteks pembangunan yang berpusat pada manusia, aspek relativitas ini penting karena menunjukkan pola hubungan struktural antara

wilayah atau komunitas. Sebagaimana diketahui, pembangunan yang berpusat pada manusia mendasarkan dari pada teori penanggulangan kemiskinan struktural (bukan kemiskinan absolut) (Sajogyo, 2006). Kalaupun menggunakan suatu garis penanda kemiskinan atau ketertinggalan wilayah, argumennya tetap diarahkan pada pengurangan kesenjangan antar manusia, kelompok, komunitas dan wilayah. Dengan demikian dimungkinkan suatu proses pemberdayaan, berupa penanggulangan resiko komunitas dengan cara menambah tenaga/kapasitas bagi lapisan tertinggal untuk menembus struktur menuju lapisan yang lebih maju.

Ada banyak penjelasan mengenai penyebab Kemiskinan. (Sharp Mudrajat Kuncoro, 2004: 157), di dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro: kemiskinan muncul akibat dari adanya perbedaan pola pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Kedua, timbulnya kemiskinan akibat dari adanya perbedaan Kualitas Sumber Daya Manusia. Perbedaan SDM tersebut antara lain dari Sisi Pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Dan yang Ketiga, munculnya kemiskinan akibat dari perbedaan akses dalam modal.

c. Jenis Kemiskinan

Pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. Menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Ridlo (2001:11), menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi: (1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi. (2) *Cyclical poverty* yaitu

kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya (Soegijoko, 1997:138; dan Esmara (1986) dalam Ridlo (2001:10) Kemiskinan absolut keberadaannya masih dapat dihilangkan (*poverty alleviation*), sedangkan kemiskinan relatif keberadaannya tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya (*poverty reduction*) (Soegijoko, 1997:138).

Berdasarkan uraian tersebut, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menerus berkembang dan perlu diatasi oleh berbagai lapisan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

2.4 Perda Kabupaten Siak tentang penanggulangan angka kemiskinan

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan otonomi kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan Pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Daerah juga mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan usaha baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing serta dapat pula melakukan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendorong

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut dibiayai dan atas beban APBD. Hal ini berarti bahwa setiap daerah Kabupaten dan kota harus mampu menggali sumber keuangan sendiri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, yang didukung oleh perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di lain pihak, seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah berharap kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, karena pada dasarnya pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan kata lain bahwa masyarakat harus diberdayakan melalui peran aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah.

Bagi Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang baru selain menghadapi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut, maka permasalahan obyektif dalam mengagendakan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah kondisi geografis dan keadaan alam yang spesifik, yang belum seluruhnya tersentuh oleh kegiatan pembangunan masa sebelumnya.

2.5 Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsep operasional sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial (Dinsos) yang dimaksud disini adalah "serangkaian upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Siak untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Siak Nomor 05 tahun 2006, tentang Fungsi Dinas Sosial (Dinsos) tingkat II Kabupaten Siak.
2. Upaya-upaya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan dengan membuat program untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan dapat di ukur yaitu:

- a. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - b. Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis kesejahteraan sosial.
3. Penanggulangan angka kemiskinan yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterahkan masyarakat miskin.

4. Miskin adalah ketidak mampuan masyarakat dari segi materi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya susah.
5. Masyarakat miskin yaitu masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni dan penghasilan yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Rumah layak huni yaitu rumah yang jauh dari kelayakan untuk di huni atau rumah yang semi permanen
7. Bantuan dalam peneltian ini yaitu bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat miskin untuk perbaikan rumah dan bantuan lain untuk menunjang ekonomi masyarakat miskin.
8. Kendala-kendala yaitu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam merealisasikan program kesejahteraan masyarakat miskin, seperti keseriusan masyarakat dalam memberdayakan komunitas yang masih rendah, lokasi yang cukup jauh, dan tidak adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari kominitas yang telah dibantu oleh Dinas Sosial.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Di Kecamatan Sei Mandau tentang peran dinas sosial terhadap penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Siak yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan agustus 2012.

3.2 Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan dan berhasil peneliti kumpulkan antara lain:

a. Data Primer, yaitu:

Data yang diperoleh langsung dari responden mengenai usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Siak dalam menaggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kabupaten Siak Provinsi Riau beserta tanggapan masyarakat Kabupaten Siak terhadap peranan atau upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder, yaitu:

Data mengenai gambaran umum Jumlah Pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Siak, serta Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Siak. Sedangkan data lainnya berupa Jumlah Penduduk Kabupaten Siak dan angka kemiskinan yang timbul pada tahun 2012.

3.3 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Keluarga miskin yang berjumlah 88 (delapan puluh delapan) Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun teknik pengambilan Sampel yaitu dengan menggunakan teknik random sampling dan dilakukan dengan hitungan Metode Rumus Slovin karena jumlah populasi yang terlalu banyak dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut ini:

$$n = \frac{N}{1+N (e^2)}$$

n = Sampel

N = Populasi

e^2 = Tingkat Kelonggaran/eror {5% - 10%}

$$n = \frac{88}{1+88 (10)^2}$$

$$n = \frac{88}{1+88 (0.02)}$$

$$n = \frac{88}{1,78}$$

$$n = 49,43$$

$$n = 49$$

Berdasarkan Rumus Pengambilan Sampel menurut Metode Rumus Slovin maka didapat sampel dari populasi yang ada sebanyak 49 KK.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner atau Angket

Dimana penulis akan memberikan lembaran pertanyaan beserta, pilihan jawabannya kepada para responden berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Penulis mengadakan serangkaian wawancara terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Observasi.

Dimana penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, prediket yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat berdasarkan yang diinginkan. Agar pemberian prediket dalam penelitian ini tepat maka sebelum dilakukan pemberian prediket, indikator-indikator penelitian diukur dengan persentase dan frekuensi yang diolah kedalam tabel serta diberi pembahasan-pembahasannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan daerah beriklim tropis basah yang relatif tinggi dan rata-rata curah hujan mencapai 991/tahun. Suhu setiap bulan antara 27.5°C dengan kelembaban 88.9% dan rata-rata sinar matahari 44.4%.

Kabupaten ini meliputi wilayah seluas 8.233,57 km² dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Daerah ini berada pada posisi 1°16' 30" LU dan 100°54' 21" - 102°54' 2" ° - 102°10' 59" BT dengan batas-batas wilayah:

Utara : Kabupaten Bengkalis
Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
Barat : Kota Pekanbaru
Timur : Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan

Kabupaten Siak memiliki potensi yang sangat strategis mengingat daerahnya berada di wilayah Segi Tiga pertumbuhan Ekonomi "SIJORI" Singapura Johor Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle). Dengan jarak hanya 150 km dari Singapura, Siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif bagi kapal pedagang di Selat Malaka dan bahkan berpotensi besar menjadi relokasi industri dan layanan perdagangan internasional.

Dibidang administrasi pemerintahan, Kabupaten Siak dibagi kedalam 13 kecamatan dan 15 desa/ kelurahan.

BPS Provinsi Riau mencatat bahwa penduduk Kabupaten Siak tahun 2006 berjumlah 302.182 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 36,70 jiwa/km.

Berkaitan dengan potensi tenaga kerja, survei nasional tentang sosial ekonomi mengungkapkan bahwa angkatan kerja usia 15-64 tahun berjumlah 174.184 jiwa atau 62.22% dari jumlah penduduk dengan penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata 14.88%.

Semenjak menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Siak dengan aktif meningkatkan infrastruktur dan fasilitasnya. Fasilitas/ infrastruktur yang telah tersedia di daerah ini meliputi transportasi darat (kondisi jalan baik/ bus dan mini bus), transportasi air (pelabuhan, ferry cepat dan kapal motor), jasa telekomunikasi (telepon, telepon selular dan internet), Perbankan (Nasional dan Bank Lokal).

Disamping itu telah ada pula fasilitas penting lain seperti Pusat Pelayanan Kesehatan, Sekolah (Negeri/ Swasta) dan perkantoran Militer dan Kepolisian.

Maka dari itu untuk lebih memajukan Kabupaten SIAK maka pemerintah kabupaten bersama jajarannya berkerja sama di dalam menjalankan roda pemerintahannya maka Kabupaten SIAK membuat visi dan misi nya

4.2 Visi dan Misi Kabupaten Siak

Jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005-2025. Vlsi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi’. yakni Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan

prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak

4.3.1 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

VISI

“Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan bermartabat ,mandiri propesional dan berdaya saing tinggi dalam hubungan yang serasi dan harmonis menuju masyarakat Kabupaten Siak yang sejahtera”

MISI

1. Meningkatkan Kualitas SDM dengan bermacam Pelatihan kualifikasi keterampilan dan keahlian /Skill yang diprioritaskan kepada tenaga kerja tempatan / lokal.
2. Meningkatkan Kesejahteraan pekerja yang meliputi pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja ,kebebasan berserikat, pemantapan hubungan industrial, perlindungan terhadap pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja
3. Menciptakan lapangan kerja baru bagi pencari kerja/penganggur melalui usaha mandiri.
4. Menjembatani pencari kerja dengan pihak perusahaan dalam pemagangan dan penetapan tenaga kerja yang diprioritaskan kepada tenaga kerja tempatan/lokal
5. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan dibidang ketenagakerjaan di perusahaan.

Visi dan Misi tersebut di atas memuat kata-kata kunci yaitu:

1. Visi

Bahwa dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,di upayakan dapat

mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan maupun kompleksitasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Misi

Terwujudnya visi merupakan tantangan bagi setiap prosesor Dinas Sosial kabupaten SIAK. visi tersebut merupakan arah yang hendak di tempuh Dinas Sosial kabupaten SIAK untuk masa depan. Namun, Visi tersebut masih bersifat abstrak. penetapan mengenai alasan tentang keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi dinyatakan dalam Misi Dinas Sosial kabupaten SIAK. Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah di tetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus di lakukan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Dinas Sosial kabupaten SIAK yang akan berperan sebagai pemandu tindakan manajemen di masa yang akan datang.

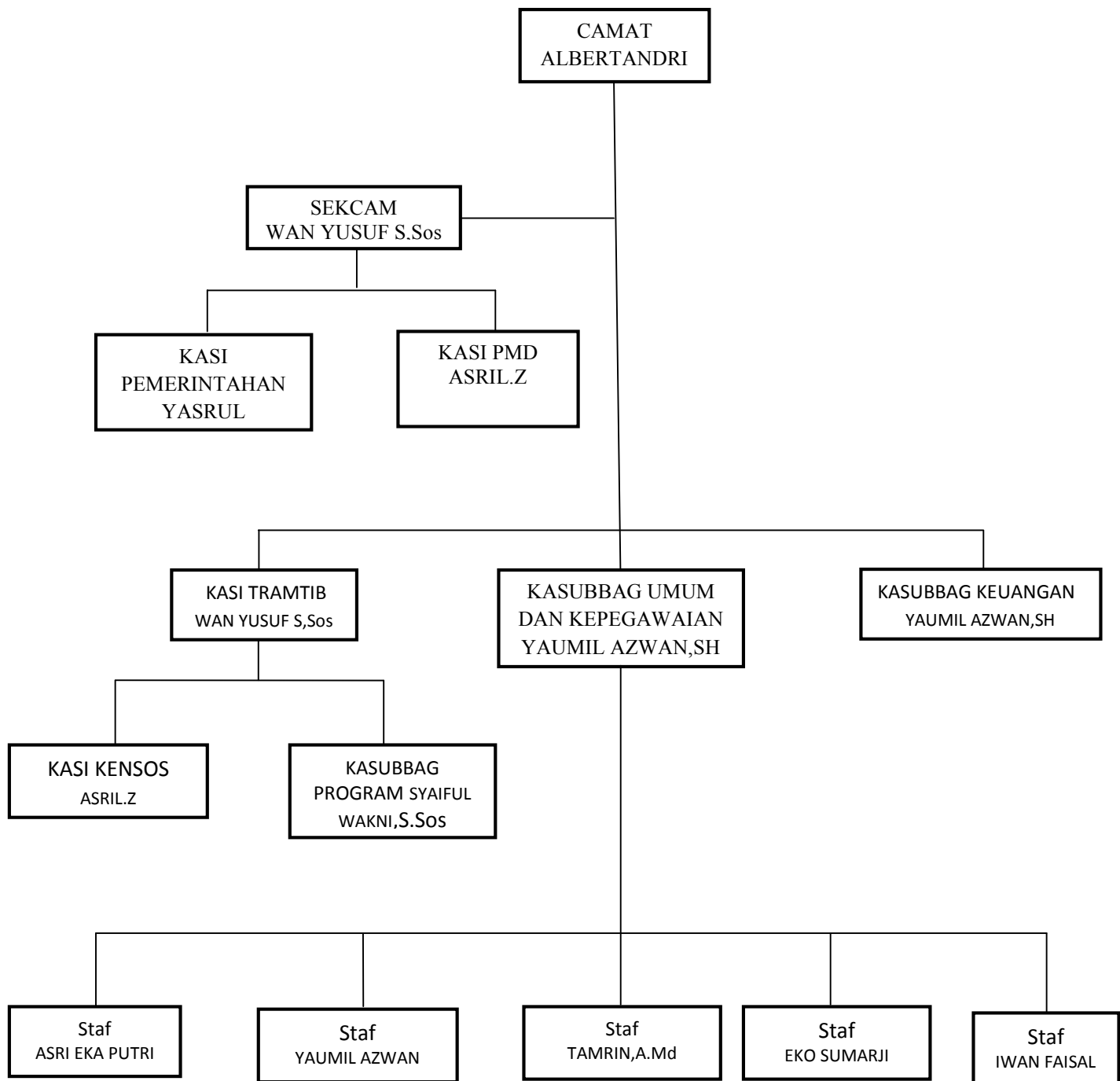
4.3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Siak

Dapat di pahami bahwa Dinas Sosial di lingkungan pemerintah kabupaten siak mempunyai tugas membantu bupati di dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang sosial, Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan dan pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang yang di embankan oleh pemerintah kabupaten siak kepada Dinas Sosial tersebut.

Maka dari itu di bentuklah struktur organisasi Dinas Sosial untuk memperjelasnya kedudukannya sesuai dengan formasi jabatannya bisa di lihat pada bagan berikut ini:

4.4 Profil Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Mandau



Terbentuknya Kecamatan Sungai Mandau sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pembedayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten SIAK, Merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang di perintah nya.

Kecamatan Sungai Mandau yang posisi pusat pemerintahannya ada di desa Muara kelantan yang kurang lebih jaraknya 80 Km dari pusat pemerintah kabupaten siak yang dapat di tempuh melalui jalan sungai,dan darat melalui perawang.

Kecamatan Sungai Mandau merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Minas yang di mekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Minas yang di laksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada perda No. 13 Tahun 2001 yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten SIAK. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi,serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintah Kecamatan.Dengan demikian potensi yang ada di Kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat,jangkauan pembangunan yang lebih baik di bandingkan dengan pemerintahan yang lama.

Nama Kecamatan Sungai Mandau diambil dari nama sebuah sungai yang bernama Mandau. Tidak terdapat sejarah yang pasti kenapa sungai tersebut dinamakan sungai mandau. Airnya yang berwarna coklat kehitaman merupakan

tipikal sungai yang ada di daerah gambut. Sungai yang berhulu di daerah Mandau ini bermuara di Sungai Siak, sehingga Sungai Mandau juga terpengaruh pasang surut sebagaimana Sungai Siak.

Sungai Mandau merupakan tempat berkembang biaknya berbagai macam jenis ikan dan hewan air tawar lainnya seperti ikan selais, juaro, gurami, patin, kelabau dan salah satu jenis ikan yang menjadi maskot Kecamatan adalah ikan Tapah.

Secara **geografis** Kecamatan Sungai Mandau terletak antara: $0^{\circ}43'-1^{\circ}16'$ Lintang Utara, dan $101^{\circ}34'-101^{\circ}59'$ Bujur Timur. Batas Kecamatan Sungai Mandau yaitu:

UTARA	:	Berbatasan Dengan Kabupaten Bengkalis,
SELATAN	:	Berbatasan Dengan Kabupaten Bengkalis,
BARAT	:	Berbatasan Dengan Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis,
TIMUR	:	Berbatasan Dengan Kecamatan Bungaraya dan Kabupaten Bengkalis.

Secara **GEOLOGI** Wilayah Kecamatan Mandau seperti pada umumnya wilayah Kabupaten SIAK terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Kecamatan Sungai Mandau secara umum berada pada daerah aliran sungai mandau dengan sebagian besar wilayah nya merupakan dataran rendah rawa-rawa, umumnya hubungan transportasi antar daerah melalaui jalan sungai sehingga perkembangan ekonomi berjalan lambat akibat sulit dan mahal nya transportasi.

Di dalam pemerintahan Kecamatan Sungai Mandau terdapat 9 desa yang membantu jalannya roda pemerintahan Kecamatan Sungai Mandau tersebut, adapun 9 desa tersebut adalah sebagai berikut:

Desa-desa Yang terdapat di Kecamatan Sungai Mandau tersebut adalah:

No	Nama Desa
1	Bencah Umbai
2	Lubuk Jering
3	Lubuk Umbut
4	Muara Bungkal
5	Muara Kelantan
6	Olak
7	Sungai Selodang
8	Tasik Betung
9	Teluk Lancang

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak sebagaimana di atas yaitu terdiri dari 9 (sembilan) Desa, yang berperan aktif dalam melakukan kegiatan administrasi khususnya di Kecamatan Sungai Mandau di dalam menjalankan roda Pemerintahannya dan pada umumnya untuk memajukan dan mengembangkan Kecamatan Sungai Mandau tersebut dari ketertinggalan baik dari segi pembangunan inprastrukturnya maupun noninprastruktur dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang di peroleh melalui penelitian yang telah dilaksanakan dan sejauh mana peran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak terhadap keluarga miskin di kecamatan Sei. Mandau dalam menaggulangi angka kemiskinan yang ada pada Kabupaten Siak. Dan juga pada bab ini akan di bahas kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak Kecamatan Sei Mandau.

Sebelum membahas lebih dalam tentang peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan perlu di ketahui bahwa kriteria atau kategori miskin menurut Dinas Sosial sendiri sama dengan penafsiran BPS yang menyatakan dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Dasar dan pendekatan index. Pendekatan pertama, merupakan pendekatan yang melandaskan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan ukuran kemiskinan absolut, dimana jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makan dan non makan, artinya komponen garis kemiskinan terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

5.1.1 Peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak

Dari hasil penelitian, peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul, dari beberapa program kerja dan kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bantuan pembangunan perumahan komunitas adat terpencil (KAT)
 - b. Bantuan perbaikan perumahan fakir miskin/rumah tidak layak huni.
 - c. Pembinaan dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).
2. Program pembinaan panti asuhan.
3. Program pembinaan anak terlantar.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menganalisa bahwa spesifikasi dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yaitu melalui program pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan modal terhadap kelompok-kelompok usaha sesuai dengan bidang usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial tersebut terhadap kelompok usaha yang dibuat oleh masyarakat di kecamatan sei. Mandau tersebut.

Dari berbagai upaya-upaya yang di laksanakan oleh Dinas Sosial tersebut, Dinas Sosial dapat di kategorikan sudah “berperan” akan tetapi, peran yang di laksanakan oleh Dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan masih belum berjalan secara maksimal, Hal ini di karenakan pemberdayaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial belum di laksanakan secara merata pada semua Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Siak.

Selain itu, pada umumnya kerja sama yang terjalin antara Dinas Sosial dan kelompok usaha bersama (KUBE) Di kabupaten siak masih belum maksimal dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Hal ini di karenakan antara kedua belah pihak belum mengetahui secara jelas manfaat yang terdapat pada kerja sama yang terjalin. Kelompok usaha tersebut masih ada yang belum menggunakan bantuan yang telah di berikan untuk menjalankan usaha pemberdayaan kelompok dalam rangka meningkatkan tarap dan kualitas hidup. hal ini di sebabkan karena tingkat kesadaran pihak kelompok usaha masih rendah sehingga bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial di gunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, hal lain yang menjadi penunjang atas terselenggaranya pelaksanaan program-program adalah melalui pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang disertai semangat kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kabupaten siak.

5.1.2 Kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di kabupaten siak

Adapun yang menjadi kendala peran atau upaya-upaya yang telah di lakukan oleh Dinas Sosial, antara lain:

- a. Tingkat keseriusan masyarakat dalam memberdayakan kelompok atau komunitasnya yang masih rendah. Contoh; pemberian dana bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial tidak di gunakan sebagaimana semestinya.
- b. Lokasi yang cukup jauh dan sulit untuk di tempuh dalam rangka melakukan pengamatan (pengawasan) secara langsung terhadap kelompok atau komunitas yang akan diberdayakan.
- c. Tidak adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat atau komunitas yang telah dibantu dan diberdayakan oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial hanya bersifat memberikan bantuan tanpa adanya usaha untuk meningkatkan komunitas tersebut agar benar-benar menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan kesejahteraan kelompoknya. Dengan kata lain, pemberian bantuan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial hanya bersifat penyaluran bantuan tanpa adanya pertanggung jawaban secara tertulis atau bukti pelaksanaan program kegiatan dari kelompok usaha yang mendapatkan bantuan pemberdayaan tersebut, sehingga dana bantuan yang di berikan tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.
- d. Kuranya pemerataan pemberian bantuan ke masing-masing kelompok usaha pada tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupaten siak.

5.2 Distribusi jawaban Responden berdasarkan hasil wawancara

Penulis akan memaparkan sejumlah data tentang biodata responden sesuai dengan bidang yang di tinjau, dari hasil responden penelitian yaitu sebagai berikut:

5.1.1 Usia Responden

Berdasarkan hasil wawancara dan angket yang telah diajukan kepada 49 orang responden, maka dapat diketahui usia para responden tersebut. Setelah usia responden di pilih, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok usia. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1.	20-29 tahun	13	26,54%
2.	30-39 tahun	19	38,77%
3.	>40 tahun	17	34,69%
	Jumlah	49 orang	100 %

Sumber: Data Penelitian 2012

Tabel di atas menunjukan bahwa usia responden yaitu mayoritas berusia 30-39 tahun yang berjumlah 19 orang dari 49 responden atau setara 38,77% dari jumlah responden. Data tersebut menggambarkan bahwa masyarakat miskin di kecamatan sei. Mandau merupakan masyarakat yang masih produktif. Sebagaimana pada tabel di atas bahwa responden yang berusia 40 tahun ke atas yaitu berjumlah 17 orang atau 34,69% dan responden yang berusia 20-29 tahun berjumlah 13 orang atau 26,54%.

5.1.2. Pendidikan Responden

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan seseorang dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan

masalah. Dan juga pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat tersebut maka tingkat kemampuan dalam berbagai hal akan tinggi, karena itulah pendidikan tersebut sangatlah penting. Selanjutnya diuraikan tingkat pendidikan responden di kecamatan sei. Mandau dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2. Distribusi jawaban responden terhadap pemberian bantuan berdasarkan tingkat pendidikan yang di lakukan Dinas Sosial kab.siak untuk masyarakat Kecamatan Sei.Mandau.

No	Pendidikan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	SD/Tidak tamat SD	19	38,77%
2.	SLTP	16	32,65%
3.	SLTA	14	28,57%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012

Pendidikan responden sebagaimana pada tabel di atas yaitu pendidikan responden mayoritas tamat SD atau tidak tamat SD yaitu berjumlah 19 orang responden dari 49 orang responden atau setara 38,77%. Sedangkan responden yang berpendidikan tingkat SLTP yaitu 16 orang atau 32,65% dan responden yang berpendidikan SLTA yaitu berjumlah 14 orang atau 28,57%. Berdasarkan data di atas dapat di analisis bahwa tingkat pendidikan responden sangatlah rendah karena mayoritas responden berpendidikan SD, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keluarga miskin di sei. Mandau mayoritas tamat SD.

5.1.3. Pekerjaan Responden

Pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonominya, karena pekerjaan layak akan berdampak baik terhadap kondisi ekonomi masyarakat begitu juga sebaliknya apabila pekerjaan masyarakat itu senditi tidak layak, maka akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Hal ini

dapat dilihat pada pekerjaan keluarga miskin di kecamatan sei. Mandau kabupaten siak yaitu untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3. : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat pekerjaan.

No	Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Petani	23	46,93%
2.	Buruh	16	32,65%
3.	Nelayan	10	20,40%
	Jumlah	49 orang	100 %

Sumber: Data Penelitian 2012

Tabel di atas menjelaskan tentang pekerjaan responden yang sebagaimana telah di jelaskan di atas yaitu pekerjaan responden mayoritas bekerja sebagai petani yang berjumlah 23 orang responden dari 49 responden atau setara 46,93%, setelah itu disusul buruh yang berjumlah 16 orang atau 32,65% dan bekerja sebagai nelayan berjumlah 10 orang atau 20,40%. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa keluarga miskin di kecamatan sei. Mandau rata-rata bekerja sebagai petani, sehingga kondisi ekonomi responden menengah ke bawah atau berada pada garis kemiskinan, karena penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

5.1.4. Jumlah Anggota Keluarga Responden

Jumlah anggota dalam keluarga sangatlah berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri, hal ini di karenakan oleh tanggungan kepala keluarga yang terlalu banyak sehingga kebutuhan keluarga sangatlah banyak. Jumlah anggota keluarga responden di jelaskan lebih jelas pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4. : Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

No	Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase
1.	1-2 orang	14	28,57%
2.	3-4 orang	20	40,81%
3.	>5 orang	15	30,61%
	Jumlah	49 orang	100 %

Sumber: Data Penelitian 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga responden mayoritas 3-4 orang atau 40,81%, sedangkan jumlah anggota keluarga besar dari lima orang yaitu berjumlah 15 orang atau 30,61% dan jumlah anggota keluarga 1-2 orang yaitu berjumlah 14 orang responden atau 28,57% dari keseluruhan responden.

5.2 Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan

Kemiskinan bukan merupakan persoalan yang asing lagi bagi masyarakat, karena kemiskinan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor sehingga yang namanya kemiskinan tersebut tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Dari persoalan tersebutlah peran dinas sosial dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut dengan berbagai program Pemerintah untuk menanggualnginya.

Peran dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan perlu diketahui bahwa menurut dinas sosial menanggulangi angka kemiskinan di kategorikan sama dengan penafsiran BPS yang mengatakan dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendektan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *head count index*. Pendekatan *basic needs approach* merupakan pendekatan yang melandasi ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Sedangkan pendekatan *head count index* menggunakan pengukuran kemiskinan absolut, dimana jumlah

penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

Peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan diantaranya yaitu:

1. Bantuan pembangunan perumahan
2. Bantuan perbaikan rumah keluarga miskin dan,
3. Pembinaan dan bantuan kelompok usaha bersama seperti pertanian dan peternakan.

Hasil penelitian di kecamatan sei. Mandau Kabupaten Siak terhadap peran dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan akan di bahas pada tabel-tabel berikut yaitu:

5.2.1 Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Keluarga Miskin

Peran dinas sosial sangat penting dalam menanggulangi angka kemiskinan, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang sangat memperhatikan dalam bidang ekonomi dan ketidak mampuan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui dinas sosial dapat mengatasi angka kemiskinan tersebut.

Pelayanan dinas sosial terhadap keluarga miskin di kecamatan sei. Mandau Kabupaten Siak untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini yaitu:

Tabel 5.5 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Pelayanan sosial yang di berikan oleh Dinas Sosial Kab. Siak Terhadap Keluarga Miskin di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	15	30,61%
2.	Kadang-kadang	24	48,97%
3	Tidak pernah	10	20,40%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menjawab kadang-kadang terhadap pelayanan Dinas Sosial terhadap keluarga miskin yaitu berjumlah 24 orang responden dari 49 orang atau setara 48,97%, responden yang menjawab sering berjumlah 15 orang atau 30,61% dan responden yang mengatakan tidak pernah yaitu berjumlah 10 orang atau 20,40%.

5.2.2 Bantuan Perbaikan Perumahan

Bantuan perbaikan perumahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial guna untuk mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Sei.Mandau, sebagaimana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memperbaiki tempat tinggal mereka yang tidak layak di huni, dengan upaya tersebut agar angka kemiskinan dapat di atasi di kecamatan sei.mandau kabupaten siak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan perumahan keluarga miskin di sei.mandau menunjukkan keragaman tanggapan dari responden, hal ini untuk lebih jelasnya yaitu pada tabel berikut ini yaitu:

Tabel 5.6 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Bantuan perbaikan perumahan keluarga miskin yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kab. Siak Kecamatan Sei. Mandau

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	18	36,73%
2.	Kadang-kadang	17	34,69%
3	Tidak pernah	14	28,57%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012

Berdasar kan data di atas dapat diketahui bahwa responden menanggapi Bantuan perbaikan perumahan keluarga miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak di kecamatan sei mandau, mayoritas responden menjawab dengan

kategori sering yang di tanggapinya oleh 18 orang responden dari 49 orang responden atau setara 36,73%, kemudian disusul oleh jawaban dengan kategori kadang-kadang yang di tanggapinya oleh 17 orang responden atau 34,69% dan responden yang menanggapi tidak pernah yaitu berjumlah 14 orang atau 28,57% dari keseluruhan responden.

5.2.3 Pembinaan Terhadap Anak-anak Terlantar

Pembinaan terhadap anak-anak terlantar merupakan suatu upaya dalam menanggulangi angka kemiskinan, karena anak-anak terlantar sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dengan adanya pembinaan tersebut seperti menjahit, kerajinan tangan dan lain sebagainya, sehingga anak-anak terlantar dapat mendapatkan masukan dan pengetahuan baru untuk kesejahteraan bagi anak-anak terlantar tersebut.

Angka anak terlantar di Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak memerlukan perhatian serius sebagai mana di atas, hal ini bertujuan agar angka anak terlantar di daerah tersebut dapat di atasi melalui pembinaan-pembinaan yang dibuat oleh dinas sosial. Pembinaan terhadap anak-anak terlantar di Kecamatan Sei. Mandau oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak, di jelas pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Distribusi Responden Berdasarkan pembinaan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kab. Siak terhadap anak-anak terlantar di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	19	30,61%
2.	Kadang-kadang	15	38,77%
3	Tidak pernah	15	30,61%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa responden menanggapi pembinaan terhadap anak-anak terlantar yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei mandau, mayoritas responden menjawab dengan kategori sering yang ditanggapi 15 orang responden dari 49 orang responden atau setara 30,61% kemudian disusul dengan jawaban dengan kategori kadang-kadang yang ditanggapi oleh 15 orang responden atau 30,61% dan responden yang menanggapi tidak pernah yaitu berjumlah 15 orang atau 30,61 % dari keseluruhan responden.

5.2.4 Pelatihan Terhadap Kelompok Usaha

Program kelompok usaha merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan, dengan adanya kelompok usaha tersebut masyarakat dapat lebih sejahtera dari sebelumnya. Upaya pemerintah tersebut memberikan pelatihan kepada masyarakat yang kelas ekonominya menengah kebawah dengan berbagai pelatihan seperti pelatihan kelompok usaha perikanan, perternakan, perkebunan dan usaha-usaha lainnya.

Pelatihan kelompok usaha di Kecamatan Sei.Mandau yang diprogramkan oleh Dinas Sosial merupakan program jangka panjang untuk membantu perekonomian masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Sei.Mandau Kabupaten Siak. Pelatihan yang diprogramkan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8 Distribusi Responden terhadap bantuan Pelatihan-pelatihan yang di beri kan oleh Dinas sosial Kab. Siak terhadap kelompok usaha bersama di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	21	34,69%
2.	Kadang-kadang	17	26,54%
3	Tidak pernah	11	28,57%
Jumlah		49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012

Berdasarkan data di atas dapat di ketahuai bahwa responden menanggapi pelatihan-pelatihan terhadap kelompok usaha bersama yang di lakukan oleh dinas sosial kabupaten siak kecamatan di sei mandau, mayoritas responden menjawab dengan kategori sering yang di tanggapi 21 orang responden dari 49 orang responden atau setara 34,69% kemudian di susul dengan jawaban dengan kategori kadang-kadang di tanggapi oleh 17 orang responden atau 26,54% kemudian di susul dengan kategori tdak pernah yang di tanggapi oleh 11 orang responden atau setara 28,57%. Dari keseluruhan responden.

5.2.5 Kelompok Usaha

Kelompok usaha adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi angka masyarakat miskin. Dengan adanya kelompok usaha tersebut perekonomian masyarakat dapat terbantu di dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan sehari-harinya. Kelompok usaha di bentuk oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah, begitulah yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak, pemerintah juga membuat program kelompok usaha di kecamatan sei. Mandau, untuk lebih jelasnya kelompok usaha tersebut dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.9 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan pembentukan kelompok usaha yang di berikan oleh dinas sosial Kab. Siak untuk masyarakat Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	21	42,85%
2.	Kadang-kadang	12	24,48%
3	Tidak pernah	16	32,65%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012.

Berdasar data di atas dapat di ketahui bahwa responden menanggapi pembentukan kelompok usaha yang di lakukan oleh dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei.mandau masih mencapai kategori sering yang di tanggapi oleh 21 orang responden dari 49 orang responden atau setara 42,85% kemudian di susul dengan kategori tidak pernah yang di tanggapi oleh 16 orang yang setara dengan 32,65% dari keseluruhan responden,dan kategori kadang-kadang yang di tanggapi oleh 12 orang responden yang setara dengan 24,48% dari keseluruhan responden.

5.2.6 Bantuan Perumahan

Program pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan juga melalui memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat yang kurang mampu (miskin). Bantuan perumahan tersebut bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah, dapat sejahterah. Bantuan perumahan di Kabupaten Siak Kecamatan Sei. Mandau bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan angka kemiskinan, hal tersebut dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Bantuan Perumahan Kepada Masyarakat Miskin yang di berikan oleh Dinas sosial Kab. Siak untuk masyarakat di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	23	46,93%
2.	Kadang-kadang	14	28,57%
3	Tidak pernah	12	24,48%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012.

berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa responden menanggapi pemberian bantuan perumahan kepada masyarakat miskin yang di lakukan oleh dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei.mandau mencapai kategori sering yang di tanggapi oleh 23 orang responden dari 49 orang responden atau setara 46,93% kemudian di susul dengan kategori kadang-kadang yang di tanggapi oleh 14 orang responden atau setara dengan 28,57% dan kategori yang tidak pernah di tanggapi oleh 12 orang responden yang setara dengan 24,48% dari keseluruhan responden.

5.2.7 Usaha Ekonomi Produktif

Usaha ekonomi produktif berkasud memberi permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil di pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Hal ini bertujuan mendorong perekonomian pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwira usaha, mendorong tumbuhnya usaha informal, untuk penyerapan tenaga kerja, menghindarkan masyarakat dari pengaruh rentenir, memfasilitasi masyarakat untuk gemar menabung.

Usaha ekonomi produktif di kecamatan sei. Madau yang telah diprogramkan oleh pemerintah melalui pemberian keterampilan usaha ekonomi

produktif oleh dinas sosial kepada masyarakat dapat di lihat lebih jelasnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Pemberian Keterampilan Dalam Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Sosial Kab. Siak terhadap masyarakat di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	19	38,77%
2.	Kadang-kadang	16	32,65%
3	Tidak pernah	14	28,57%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012.

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa responden menanggapi pemberian keterampilan dalam usaha ekonomi produktif yang di lakukan oleh dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei.mandau masih mencapai kategori sering yang di tanggapi oleh 19 orang responden dari 49 orang responden yang setara dengan 38,77%, kemudian di susul dengan kategori kadang-kadang yang di tanggapi oleh 16 orang responden yang setara dengan 32,65%, dan kategori tidak pernah yang di tanggapi oleh 14 orang responden yang setara dengan 28,57% dari keseluruhan responden.

5.2.8 Pembinaan Gelandangan

Pembinaan gelandangan merupakan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah memberikan pengawasan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pembinaan gelandangan. Dengan bimbingan yang diberikan kepada gelandangan seperti pelatihan keterampilan, sehingga dengan pembinaan tersebut gelandangan dapat lebih maju dan tidak menjadi gelandangan lagi sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh

gelandangan. Pembinaan gelandangan yang diberikan oleh dinas sosial di Kecamatan Sei. Mandau dapat di lihat lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Gelandangan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kab. Siak terhadap masyarakat di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	20	40,81%
2.	Kadang-kadang	17	34,69%
3	Tidak pernah	12	24,48%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012.

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa responden menanggapi pembinaan dan bimbingan terhadap gelandangan yang di lakukan oleh dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei.mandau masih mencapai kategori sering yang di tanggapi oleh 20 orang responden dari 49 orang responden atau setara 40,81% kemudian di susul dengan kategori kadang-kadang yang di tanggapi oleh 17 orang responden yang setara dengan 34,69%, dan kategori tidak pernah yang di tanggapi oleh 12 orang responden yang setara dengan 24,48% dari responden yang ada.

5.2.9 Pembinaan Keterampilan Kesejahteraan Keluarga

Merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya di dalam membangun, membina dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan keluarga, perempuan juga mempunyai andil dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok, salah satu buktinya

bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Pembinaan keterampilan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sei. Mandau yang di berikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat yaitu dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Pembinaan Keterampilan Terhadap Kesejahteraan Keluarga yang di berikan oleh Dinas sosial Kab. Siak terhadap masyarakat Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	18	36,73%
2.	Kadang-kadang	21	42,85%
3	Tidak pernah	10	20,40%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012.

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa responden menanggapi keterampilan terhadap kesejahteraan keluarga yang di lakukan oleh dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei.mandau mencapai kategori kadang-kadang yang di tanggapi oleh 21 orang responden dari 49 orang responden atau setara 42,85% kemudian di susul dengan kategori sering yang di tanggapi 18 orang responden atau setara 36,73%, dan kategori tidak pernah yang di tanggapi oleh 10 orang responden dari responden yang ada.

5.2.10 Penyuluhan Bencana Alam

Penyuluhan bencana alam sangatlah penting bagi masyarakat hal ini bertujuan untuk agar masyarakat agar dapat tanggap terhadap bencana alam, oleh karena itu pemerintah memberikan pelatihan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat tanggap sehingga dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat agar tidak terjadi hal yang membahayakan

atau mengancam masyarakat, baik dari alam maupun dari manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan kehilangan harta benda masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan dalam mengantisipasi bencana alam yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.14 Distribusi jawaban Responden yang di berikan Dinas sosial Kabupaten Siak, Berdasarkan Penyuluhan Dalam Mengantisipasi Bencana Alam di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	11	22,44%
2.	Kadang-kadang	20	40,81%
3	Tidak pernah	18	36,73%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012.

Berdasarkan data yang di atas dapat di ketahui bahwa responden menanggapi penyuluhan dalam mengantisipasi yang di lakukan dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei.mandau masih mencapai kategori kadang-kadang yang di tanggapi oleh 20 orang responden dari 49 orang responden atau setara 40,81% kemudian di susul dengan kategori tidak pernah yang di tanggapi oleh 18 orang responden yang setara dengan 36,73%, dan kategori sering di tanggapi oleh 11 orang responden yang setara dengan 22,44% dari keseluruhan responden.

5.2.11 Pembinaan Karang Taruna

Karang taruna merupakan tombak kemajuan daerah atau kecamatan atau desa. Karang taruna sebagai salah satu kegiatan sosial, salah satu kekuatan sosial, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan guna mendukung pengetasan kemiskinan, pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda.

Tujuan dari program pembinaan karang taruna di Kecamatan Sei. Mandau yaitu kesejahteraan masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin, sehingga pemerintah Kabupaten Siak membentuk suatu program pembinaan karang taruna agar pengentasan angka kemiskinan di Kecamatan Sei. Mandau dapat di atasi. Pelatihan karang taruna ini dapat di lihat lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Distribusi jawaban Responden Berdasarkan Pembinaan Terhadap Karang Taruna yang di berikan oleh Dinas sosial Kabupaten Siak kepada terhadap karang taruna yang ada di Kecamatan Sei. Mandau.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sering	17	34,69%
2.	Kadang-kadang	13	26,54%
3	Tidak pernah	19	38,77%
	Jumlah	49 orang	100%

Sumber: Data Penelitian 2012.

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwa responden menanggapi pembinaan terhadap karang taruna yang di lakukan oleh dinas sosial kabupaten siak di kecamatan sei.mandau masih mencapai kategori tidak pernah yang di tanggapi oleh 19 orang responden dari 49 orang atau setara dengan 38,77%, kemudian di susul dengan kategori sering yang di tanggapi oleh 17 orang responden atau setara dengan 34,69%, dan kategori kadang-kadang di tanggapi oleh 13 orang responden yang setara dengan 26,54% dari keseluruhan responden.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih baik dari sebelumnya baik secara fisik maupun non fisik. Berbagai pembangunan dari segi fisik telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah bahkan sampai ke desa-desa. Namun, pembangunan dari segi non fisik berupa pembangunan sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat secara merata masih dapat di kategorikan belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu tentang peran dinas sosial dalam mengentaskan kemiskinan dapat di simpulkan yaitu:

Usia responden atau keluarga miskin di kecamatan Sei Mandau yaitu mayoritas berusia 30-39 tahun atau usia produktif masyarakat dan juga di ikuti oleh tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas berpendidikan SD/tidak tamat SD, hal ini lah yang juga merupakan salah satu penyebab masyarakat kecamatan Sei Mandau berekonomi kelas menengah kebawah. Pekerjaan masyarakat yang mayoritas petani juga mengakibatkan masyarakat berekonomi kelas bawah karena pekerjaan responden berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, dan juga tanggungan keluarga yang besar.

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak telah dilakukan dengan berbagai program yang salah satunya yaitu program pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan modal terhadap kelompok-kelompok usaha sesuai dengan bidang usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial tersebut terhadap kelompok usaha yang dibuat oleh masyarakat di kecamatan Sei Mandau tersebut.
2. Program yang dibuat oleh Dinas Sosial untuk mengentaskan angka kemiskinan di Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak, terkendala oleh berbagai faktor salah satunya yaitu faktor kurangnya keseriusan masyarakat dalam memberdayakan kelompok yang masih rendah.
3. Peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan diantaranya yaitu, Bantuan pembangunan perumahan, Bantuan perbaikan rumah keluarga miskin dan, Pembinaan dan bantuan kelompok usaha bersama seperti pertanian dan peternakan, dikategori sering program yang telah dibuat oleh Dinas Sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sei Mandau kabupaten Siak.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di kabupaten siak.
 - a. Tingkat keseriusan masyarakat dalam memberdayakan kelompok atau komunitasnya yang masih rendah. Contoh; pemberian dana bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak digunakan sebagaimana semestinya.

- b. Lokasi yang cukup jauh dan sulit untuk di tempuh dalam rangka melakukan pengamatan (pengawasan) secara langsung terhadap kelompok atau komunitas yang akan diberdayakan.
- c. Tidak adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat atau komunitas yang telah dibantu dan diberdayakan oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial hanya bersifat memberikan bantuan tanpa adanya usaha untuk meningkatkan komunitas tersebut agar benar-benar menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan kesejahteraan kelompoknya. Dengan kata lain, pemberian bantuan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial hanya bersifat penyaluran bantuan tanpa adanya pertanggung jawaban secara tertulis atau bukti pelaksanaan program kegiatan dari kelompok usaha yang mendapatkan bantuan pemberdayaan tersebut, sehingga dana bantuan yang di berikan tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.
- d. Kurangnya pemerataan pemberian bantuan ke masing-masing kelompok usaha pada tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupaten siak.

Distribusi jawaban responden terhadap peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kecamatan Sei.mandau Kab. SIAK yang di sajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan bidang pertanyaan pada responden yang ada.

1. Berdasarkan hasil wawancara dan angket yang telah diajukan kepada responden, maka dapat diketahui usia para responden tersebut. Setelah usia responden di pilih, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok usia. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel 5.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Usia.
2. Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan seseorang dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Dan juga pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat tersebut maka tingkat kemampuan dalam berbagai hal akan tinggi, karena itulah pendidikan tersebut sangatlah penting. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 5.2 :
3. Pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonominya, karena pekerjaan layak akan berdampak baik terhadap kondisi ekonomi masyarakat begitu juga sebaliknya apabila pekerjaan masyarakat itu senditi tidak layak, maka akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada pekerjaan keluarga miskin di kecamatan sei. Mandau kabupaten siak yaitu untuk lebih jelasnya pada tebel 5.3 :
4. Jumlah anggota dalam keluarga sangatlah berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri, hal ini di karenakan oleh tanggungan kepala keluarga yang terlalu banyak sehingga kebutuhan

keluarga sangatlah banyak. Jumlah anggota keluarga responden di jelaskan lebih jelas pada tabel 5.4 :

5. Pelayanan dinas sosial terhadap keluarga miskin di kecamatan sei. Mandau Kabupaten Siak untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 5.5:

6. Bantuan perbaikan perumahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial guna untuk mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Sei.Mandau, sebagaimana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memperbaiki tempat tinggal mereka yang tidak layak di huni, dengan upaya tersebut agar angka kemiskinan dapat di atasi di kecamatan sei.mandau kabupaten siak, hal ini untuk lebih jelasnya yaitu pada tabel 5.6 :

7. Angka anak terlantar di Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak memerlukan perhatian serius sebagai mana di atas, hal ini bertujuan agar angka anak terlantar di daerah tersebut dapat di atasi melalui pembinaan-pembinaan yang dibuat oleh dinas sosial. Pembinaan terhadap anak-anak terlantar di Kecamatan Sei. Mandau oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 5.7 :

8. Pelatihan kelompok usaha di Kecamatan Sei.Mandau yang di programkan oleh Dinas Sosial merupakan Progam jangka panjang untuk membantu perekonomian masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan

yang ada di Kecamatan Sei.Mandau Kabupaten Siak. Pelatihan yang diprogramkan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.8 :

9. Kelompok usaha di bentuk oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah, begitulah yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak, pemerintah juga membuat program kelompok usaha di kecamatan sei. Mandau, untuk lebih jelasnya kelompok usaha tersebut dapat di jelaskan pada tabel 5.9 :
10. Program pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan juga melalui memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat yang kurang mampu (miskin). Bantuan perumahan tersebut bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah, dapat sejahterah. Bantuan perumahan di Kabupaten Siak Kecamatan Sei. Mandau bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan angka kemiskinan,dapat di jelaskan pada tabel 5.10:
11. Usaha ekonomi produktif berkasud memberi permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil di pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Hal ini bertujuan mendorong perekonomian pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwira usaha, mendorong tumbuhnya usaha informal, untuk penyerapan tenaga kerja, menghindarkan masyarakat dari pengaruh rentenir,

mempasilitasi masyarakat untuk gemar menabung, dapat di lihat lebih jelasnya yang disajikan pada tabel 5.11:

12. Pembinaan gelandangan merupakan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah memberikan pengawasan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pembinaan gelandangan. Dengan bimbingan yang diberikan kepada gelandangan seperti pelatihan keterampilan, sehingga dengan pembinaan tersebut gelandangan dapat lebih maju dan tidak menjadi gelandangan lagi sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh gelandangan. Pembinaan gelandangan yang diberikan oleh dinas sosial di Kecamatan Sei. Mandau dapat di lihat lebih jelasnya pada tabel 5.12:

13. Merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya di dalam membangun, membina dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan keluarga, perempuan juga mempunyai andil dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok, salah satu buktinya bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 5.13:

14. Penyuluhan bencana alam sangatlah penting bagi masyarakat hal ini bertujuan untuk agar masyarakat agar dapat tanggap terhadap bencana

alam, oleh karena itu pemerintah memberikan pelatihan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat tanggap sehingga dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat agar tidak terjadi hal yang membahayakan atau mengancam masyarakat, baik dari alam maupun dari manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan kehilangan harta benda masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan dalam mengantisipasi bencana alam yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 5.14 :

15. Karang taruna merupakan tombak kemajuan daerah atau kecamatan atau desa. Karang taruna sebagai salah satu kegiatan sosial, salah satu kekuatan sosial, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan guna mendukung pengentasan kemiskinan, pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda. Tujuan dari program pembinaan karang taruna di Kecamatan Sei. Mandau yaitu kesejahteraan masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin, sehingga pemerintah Kabupaten Siak membentuk suatu program pembinaan karang taruna agar pengentasan angka kemiskinan di Kecamatan Sei. Mandau dapat di atasi. Pelatihan karang taruna ini dapat di lihat lebih jelasnya pada tabel 5.15:

6.2 Saran

Kemandirian kelompok-kelompok usaha tersebut, baik pada masa mendatang. pemberdayaan dari Dinas Sosial maupun setelah lepas dari Dinas Sosial untuk menjadi lebih mandiri maka masing-masing kelompok usaha tersebut harus meningkatkan semangat kewirausahaan agar apa yang di bangun selama ini mampu menjadi penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau komunitas tersebut serta menjadi lebih mandiri sehingga angka kemiskinan dapat di tanggulasi secara optimal. Selain itu, semangat untuk berkerja sama harus terus di galakkan karena melalui kerja sama akan tercipta suatu peluang besar yang dapat merubah hidup suatu kelompok atau komunitas menjadi lebih baik dari pada sebelumnya

Selain dari itu, hal lain yang juga menjadi penunjang atas terselenggaranya pelaksanaan program-program yang akan di jalankan oleh kelompok usaha tersebut adalah melalui pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang di sertai semangat kewirausahaan yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan tarap hidup yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Siak.

Daftar Pustaka

- Ala, Andre Bayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Ali, Hasymi. 2002. *Organisasi dan Manajemen Jilid 1, Ed IV*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ari Kunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Efendi, Tadjuddin Noer. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hartono. 2006. *Statistik Untuk Penelitian. Cet. 3. Lembaga Studi Filsafat Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Kuncoro, Drajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Kontur, Roni. 2002. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah - Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemah: Matheos Nalle Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Rusli, Said (ed). 1995. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor.
- Ridlo, Mohammad Agung. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Penerbit Unissula Press.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Sulistiyan, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Soerjono S. 2000. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudijono, Anas. 2004. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, S.P. 2007. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sajogyo. 1996. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Thoha, Miftah. 2005 *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Ed. I. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Winardi, E. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. 2007. Visi Media: Jakarta.
- Dinas Sosial. 2009. *Profil Dinas Daerah Kabupaten Siak Propinsi Riau*.
- BPS Kabupaten Siak, 2009.
- PP RI No. 41 Tahun 2007. *Tentang Organisasi Peangkat Daerah*. Fokus Media: Bandung.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- Perda Kabupaten Siak No. 05 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Siak.